

ABSTRAK

KSPPS BMT El-Labana Semarang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menghimpun dana umat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu pembiayaan ijarah. Pada umumnya pembiayaan ijarah yaitu pembiayaan yang menawarkan barang/jasa untuk disewa dengan pembayarannya secara cicilan. Dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terjadi adanya permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah dan kesesuaian pembiayaan ijarah terhadap Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan deskriptif komparatif yaitu menganalisis data kemudian membandingkannya dengan pedoman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan ijarah berdasarkan Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000 terdapat beberapa aturan yang tidak sesuai. KSPPS BMT El-Labana Semarang bertindak sebagai penyedia dana talangan yang diberikan kepada anggota dengan menggunakan akad wakalah. Penggunaan akad wakalah ini setelah terjadinya akad ijarah, jadi dapat disimpulkan bahwa barang belum sepenuhnya milik KSPPS BMT El-Labana Semarang.

Kata kunci : KSPPS BMT El-Labana Semarang, Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000

ABSTRACT

KSPPS BMT El-Labana Semarang is a Sharia Financial Institution that collects ummah funds by applying sharia principles. One of the products offered is ijarah financing. In general, ijarah financing is financing that offers goods/ services for rent with repayments. In practice it does not rule out the possibility of problems occurring. Therefore this study aims to determine how the ijarah financing mechanism and the suitability of ijarah financing towards the DSN Fatwa NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Financing of Ijarah.

This study uses a type of qualitative descriptive research using interview methods and documentation methods in data collection. The data analysis technique uses descriptive comparative namely analyzing the data then comparing it with the guidelines.

The results of this study indicate that the practice of ijarah financing based on DSN Fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 there are several rules that are not appropriate. KSPPS BMT El-Labana Semarang acts as a provider of bailout funds given to members using a wakalah contract. The use of this wakalah contract after the ijarah contract, so it can be concluded that the goods do not fully belong to KSPPS BMT El-Labana Semarang.

Keywords : *KSPPS El-Labana BMT Semarang, Ijarah Financing, DSN Fatwa NO:09/DSN-MUI/IV/2000*